



**BULETIN**

# **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 768/IV/2013

IV/APRIL 2013



## **DPR Desak Pemerintah Segera Umumkan Kenaikan BBM**

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR APRIL 2013

Kegiatan AKD DPR-RI pada minggu terakhir bulan April ini AKD DPR-RI memasuki Masa Reses Persidangan III 2012-2013 yang dimulai tanggal 13 April sampai 12 Mei 2013. Pembukaan Masa Sidang IV akan dimulai pada 13 Mei 2013. Berikut beberapa poin kegiatan Dewan minggu keempat April 2013:

## Alokasi Waktu Masa Persidangan IV

Rapat Bamus tanggal 4 April memutuskan mengenai jadwal acara rapat-rapat DPR. Masa Persidangan IV tahun 2012-2013 akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei dan berakhir pada 12 Juli 2013, berjumlah 44 hari kerja atau 61 hari kalender. Masa Reses Persidangan IV akan dimulai 13 Juli dan diakhiri 15 Agustus, berjumlah 25 hari kerja, atau 34 hari kalender. Pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang 2013-2014, akan dilaksanakan pada Jumat 16 Agustus 2013.

Karakteristik dalam Masa Persidangan IV: di bidang legislasi adalah penyelesaian RUU yang sedang ditangani oleh Alat Kelengkapan Dewan, menyusun RUU usul inisiatif sesuai prioritas Prolegnas 2013. Di bidang anggaran adalah melakukan pembahasan pendahuluan RAPBN TA 2014. Di bidang pengawasan adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester kedua TA 2012, melanjutkan penugasan Tim-Tim Pengawas yang dibentuk oleh DPR, antara lain Tim Pengawas Century, Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Pertanian dan Konflik Agraria, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Materi lain yang akan diagendakan pada Masa Persidangan IV adalah penetapan pejabat publik, antara lain persetujuan calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pengganti Antar Waktu Anggota BPK-RI, calon

## Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dan pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat.

## Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan Tata Tertib DPR Pasal 152 ayat (2), dalam Masa Persidangan IV, Pemerintah akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada tanggal 20 Mei dalam Rapat Paripurna Dewan. Kegiatan ini berkaitan dengan pembahasan pendahuluan RAPBN 2014. Dijadwalkan, kegiatan ini berturut-turut meliputi: [1] Rapur 20 Mei 2013 dengan acara Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2014. [2] Rapur 23 Mei 2013, dengan acara Pandangan Fraksi-Fraksi Atas Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2014. [3] Rapur tanggal 28 Mei, dengan acara Tanggapan Pemerintah

terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2014.

## Pelaksanaan Fungsi Legislasi

RUU yang harus selesai pada Masa Persidangan IV 2012-2013 antara lain: RUU tentang Perjanjian Internasional (Komisi I), RUU tentang Aparatur Sipil Negara (Komisi II), dan RUU tentang Pemilukada (Komisi II), serta 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru oleh Komisi II.





Juga RUU tentang Hukum Acara Pidana, RUU tentang Hukum Pidana, RUU tentang Kejaksaan RI, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (oleh Komisi III). Komisi IV antara lain RUU tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pembalakan Liar (P3L), RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Komisi V: RUU tentang Jalan. Komisi VI: RUU tentang Perdagangan dan Perindustrian. Komisi VII: RUU tentang Keanekaragaman. Komisi VIII RUU tentang Jaminan Produk Halal. Komisi IX RUU tentang Tenaga Kesehatan. Komisi X RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Komisi XI RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. Baleg: RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pansus-pansus antara lain: RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Desa, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

### Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam rangka pengawasan, maka dalam Reses Masa Persidangan III 2012-2013, Komisi-Komisi DPR melakukan kunjungan kerja sebagai berikut:

No.	Komisi	Provinsi
1.	I	Bali, Kalimantan Tengah dan Papua
2.	II	Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Papua Barat
3.	III	Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku
4.	IV	Kepulauan Riau, Jawa tengah dan Papua Barat.
5.	V	-
6.	VI	Jambi dan Sumatera Utara
7.	VII	Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara
8.	VIII	Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur
9.	IX	Bangka Belitung, dan Jawa Tengah
10.	X	Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara
11.	XI	DKI Jakarta, Bengkulu dan Kalimantan Tengah

### Pelantikan PAW

Ketua DPR-RI pada hari Jum'at, 19 April 2013, memimpin Pengucapan Sumpah Jabatan oleh tiga orang anggota DPR Pergantian Antar-Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai PDI-Perjuangan. Ketiga anggota PAW yang diambil sumpah jabatannya masing-masing yaitu Rahman Halid menggantikan Akbar

Faisal (Fraksi Hanura) sebagai anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II. Kemudian Zulfikar dari Dapil Sumatera Utara III menggantikan Maiyasyak Johan (FPP) serta Abidin Fikri menggantikan Theodoros Jakob Koekritis (FPDI-Perjuangan) dari Dapil Jawa Timur VI. Prosesi pengambilan sumpah dan jabatan terhadap tiga orang anggota PAW berlangsung khidmat dan tertib, dihadiri antara lain Ketua Umum Hanura Wiranto, Sekjen PPP Romahurmuziy, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, Sekjen PDIP Ahmad Basarah, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti.

Pada Selasa, 23 April 2013, Ketua DPR juga memimpin pengucapan sumpah jabatan anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Golongan Karya, yaitu Ebrown Lubuk menggantikan Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain dari Dapil Banten III.

Pada sambutan Ketua DPR disampaikan, pertama, terkait dengan kode etik anggota DPR, anggota baru dapat mempelajarinya dengan baik karena kode etik merupakan koridor untuk melaksanakan fungsi sebagai anggota DPR. Kedua, terkait dengan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, diharapkan anggota yang baru juga mempelajari UU No. 27 Tahun 2009, dan tata tertib DPR No. 1 Tahun 2009. Apabila anggota PAW ini memahami kedua hal tersebut, insya Allah, anggota PAW dapat melaksanakan tugas dengan baik ketika di tempatkan di alat kelengkapan Dewan. Selain itu, anggota PAW dapat mewakili dapil masing-masing untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan dapat mengakhiri masa jabatannya dengan khusnul khotimah.

### Diplomasi Parlemen

Atas undangan Ketua Milli Mejlis Republik Azerbaijan H.E. Ogtay Asadov, Ketua DPR RI dan delegasi DPR RI telah memenuhi undangan tersebut, dengan berkunjung ke Azerbaijan, pada tanggal 14 – 18 April 2013. Kunjungan bertujuan untuk meningkatkan hubungan komunikasi dan kerjasama berbagai sektor di antara kedua negara, serta untuk menyampaikan dan menegaskan kembali dukungan langsung dan riil dari Indonesia terhadap dua persoalan strategis politik yang masih menyisa dalam kehidupan negara Republik Azerbaijan, yakni konflik wilayah Nagorno-Karabakh dan isu tragedi Khojaly.

Selain itu, dalam kunjungan kepada Perdana Menteri Azerbaijan H.E. Artur Rasizade dan Presiden Azerbaijan H.E. Ilham Aliyev, Ketua DPR RI juga menyampaikan perlunya peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral, di mana saat ini nilai neraca perdagangan kedua negara menunjukkan defisit bagi Indonesia. Ketua DPR RI mengharapkan peningkatan transaksi impor produk Indonesia dan investasi dari Azerbaijan. Selain itu, kunjungan DPR RI ke Azerbaijan juga untuk mendukung diplomasi "people-to-people contact", dalam wujud kunjungan ke Pusat Studi Indonesia di Azerbaijan University of Languages di Baku Azerbaijan, serta memberikan sejumlah buku bagi pengembangan Pusat Studi Indonesia tersebut.\*\*

# DPR Desak Pemerintah Segera Umumkan Kenaikan BBM



Salah satu kilang BBM.

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak agar tidak menjadi isu berkepanjangan yang bisa dimanfaatkan oleh para spekulan untuk mengambil keuntungan dengan merugikan rakyat.

“Dari dulu kami mendesak pemerintah menyesuaikan harga BBM, karena APBN kita ‘over quota’ melulu soal subsidi BBM ini,” kata Ketua Komisi VII, Sutan Bathoegana usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI bertemu dengan jajaran PT Pertamina dan PT PLN Wilayah Sulawesi di Palu, Sulawesi Tengah baru-baru ini.

“Disparitas harga BBM saat ini terlalu tinggi. Harga BBM industri dan perkebunan (non subsidi) mencapai Rp. 11.000 tapi di SPBU hanya Rp. 4.500 per liter,” imbuhnya.

Menurut dia, situasi ini mudah sekali disalahgunakan. Sebagai bukti, setiap tahun selalu ‘over quota’ penggunaan BBM di APBN.

Soal berapa harga baru, Sutan mengaku bahwa pemerintah lebih mengetahui, namun ia berharap penyesuaian dilakukan secara menyeluruh, artinya harga BBM cukup satu macam saja.

“Penetapan harga jangan parsial lagi. Ada harga untuk orang kaya dan harga untuk yang lain. Kalau parsial, ini sangat riskan,” ujarnya.

Rencana kenaikan harga BBM seperti diberitakan akan diberlakukan dua harga, yaitu harga premium untuk motor dan angkutan umum tetap Rp. 4.500,- sedangkan untuk mobil pribadi harganya ditetapkan Rp. 6.500,-/liter.

Sementara itu sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut,

pemerintah masih terus mematangkan tiga program yang sudah ada yakni beras untuk rakyat miskin, bantuan siswa miskin dan program keluarga harapan.

## Ragukan Pengawasan:

Hal yang sama dikemukakan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang meragukan pengawasan terhadap rencana penerapan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dikhawatirkan, jika sampai kebijakan ini salah, sama saja pemerintah memberi ruang untuk mencuri. Akibat pencurian BBM ini, akibatnya seolah-olah konsumsi BBM Indonesia meningkat.

“Ini yang dari dulu kami sangat meragukan. Agak susah untuk mengawasinya karena

adanya disparitas harga yang besar, membuka ruang untuk mencuri. Tapi tidak tahu kalau ada mekanisme lain, artinya menyalurkan subsidi ini orang yang tepat, diawasi dan sampai ke konsumen juga pas,” kata Marzuki di Gedung Nusantara, Jumat (19/4).

Marzuki menambahkan, bila ada sistem dan orang-orang yang berkaitan langsung dengan kenaikan BBM itu harus memiliki sifat jujur, maka penggunaan BBM bersubsidi itu bisa berjalan dengan baik.

Ia mengimbau kepada siapapun yang punya kewenangan dengan BBM agar memiliki hati nurani, jangan sampai menyakiti rakyat dan menyusahkan negara. Ia melihat, pencurian BBM bersubsidi sama saja dengan mencuri minyak rakyat. Ia juga meminta pemerintah agar menaikkan BBM dengan mempertimbangkan keadaan rakyat.

“Inikan domainnya pemerintah. Harus dipikirkan solusi bagi masyarakat. Yang tadinya hampir miskin, karena kenaikan harga minyak jadi tambah miskin. Tetapi pemerintah harus pikirkan jangka panjang keberlangsungan pembangunan. Kalau hanya habis untuk subsidi saja, maka pembangunan infrastruktur tertinggal,” katanya.

Anggota Komisi VII Halim Kalla (F-PG) dan Mulyadi (F-Gerindra) menyekalkan lambannya pemerintah mengambil keputusan soal kenaikan harga BBM sehingga spekulasi bahan bakar kini merajalela.

“Kenapa sih pemerintah masih ragu, toh semua gubernur sudah setuju bahkan sudah lama mengusulkan agar lebih baik harga BBM dinaikkan karena BBM subsidi di daerah selalu habis dinikmati para spekulasi,” ujar Halim Kalla.

Halim Kalla menyatakan, bahwa kenaikan BBM bersubsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp. 7.000 per liter sudah ideal untuk mengurangi anggaran subsidi Rp. 300 triliun di APBN karena hal itu sudah tidak sehat lagi.

Ia mengakui, penyesuaian BBM ini akan mengakibatkan kenaikan harga dalam beberapa bidang namun di bidang lain akan terjadi penurunan dan pengurangan kemiskinan, asal pemerintah pandai menggunakan dana hasil penghematan subsidi itu untuk keperluan yang terkait langsung dengan kebutuhan rakyat.

Sementara, Mulyadi (F-Gerindra) meminta jajaran Pertamina di seluruh daerah untuk lebih mewaspadai permainan oknum-oknum spekulasi yang mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan bertele-telanya keputusan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM. (sc,sf) foto:wahyu/parle

## Sekjen DPR Lantik 25 Orang Pejabat Setjen DPR



Sekjen DPR Winantuningtyastiti lantik 25 pejabat Setjen DPR.

Sekjen DPR RI melantik 25 orang Pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. “Pelantikan ini dimaksudkan sebagai bagian dari penataan SDM,” ujar Sekjen DPR Winantuningtyastiti saat melantik pejabat Setjen DPR RI, di Gedung Nusantara, Rabu (23/4).

Menurut Win, tujuan mutasi ini dalam rangka mengoptimalkan kerja organisasi yang lebih baik lagi. “Memang dalam mengoptimalkan organisasi itu sulit, perlu perencanaan,” ujarnya.

Win mengatakan, perlu evaluasi dan kecermatan dalam melaksanakan tugas di setiap unit kerja. “Memang perlu ada pengalaman, pembelajaran dan kompetensi setiap karyawan, karena itu perlu adanya penataan terus menerus dan harus bertanggung jawab terhadap tupoksinya,” paparnya.

Dia menambahkan, mutasi memang tidak harus sesuai dengan *backgroundnya*, karena yang utama semakin banyaknya pengalaman kerja para karyawan di lingkungan Setjen DPR.

Sekjen DPR menegaskan, program Reformasi Birokrasi harus terus berjalan dan semuanya terus berproses guna menata organisasi di Lingkungan Setjen DPR. “Mudah-mudahan yang menjadi tuntutan terhadap Setjen dapat direalisasi dan optimal,” tambahnya.

Dia mengharapkan mutasi atau *tour of duty* dapat menjadi motivasi dan penyegaran bagi para Pejabat di Lingkungan Setjen DPR. “Mudah-mudahan bisa muncul ide baru sehingga dapat menjadi lebih kreatif dan tertata, serta semakin disiplin,” katanya.

Sekjen juga meminta semua pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dalam menjalankan tugas barunya. “Mudah-mudahan tidak sulit membangun kerjasama antar unit,” tambahnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.



# Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan Jabar Masih Sangat Rendah



Anggota Komisi X DPR Hj. Harbiah Salahuddin.

Pemerintah Daerah Jawa Barat sudah saatnya mendorong masyarakat untuk meningkatkan minat baca di perpustakaan, mengingat sampai saat ini masyarakat Jabar utamanya anak-anak masih sangat kurang datang ke Perpustakaan untuk membaca buku.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR Hj. Harbiah Salahuddin, saat pertemuan dengan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Enny Heryani Ratnasari di Gedung Perpustakaan Daerah Jalan Kawaluyaan Indah II no. 4 Sukarno Hatta Bandung Selasa (23/4) sore.

Harbiah Salahuddin menambahkan sudah saatnya Pemda mengcover dan meningkatkan minat baca khususnya untuk anak-anak dan utamanya di Perpustakaan keliling. Demikian pula perpustakaan Desa harus lebih ditingkatkan sehingga menarik anak-anak untuk datang dan membaca buku.

Minat baca, lanjut dia, mestinya muncul dari masyarakat, sementara pemerintah menyediakan sarana dan prasarana ataupun program yang menunjang minat baca. Ia yakin bila minat baca ditingkatkan ditinjau situasi dan kondisi yang positif, maka anak-anak akan menjadi senang dan rajin mendatangi perpustakaan untuk membaca buku.

Sementara Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Hj. Enny Heryani Ratnasari mengungkapkan, konsep dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam membangun Perpustakaan utamanya untuk meningkatkan minat baca sudah dilakukan. Seperti mengembangkan perpustakaan Desa serta mengembangkan layanan mobil perpustakaan keliling, dan bekerjasama jaringan perpustakaan dengan Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Sekolah TK, SD, SMP dan SMA serta Taman

Bacaan.

Namun diakuinya, selama ini masih mengalami kendala, yaitu rendahnya minat baca masyarakat yang diakibatkan lebih banyaknya budaya menonton televisi. Acara TV bagi anak-anak lebih menarik sekaligus menyita banyak waktu luang sehingga tidak tersedia untuk membaca.

Pemda lanjut Heryani, selalu berupaya mendorong minat baca masyarakat dalam mewujudkan Budaya Baca dan Budaya Menulis. Dia juga mengatakan bahwa program perpustakaan desa sudah dikembangkan melalui dana dekonsentrasi (APBN) sejak tahun anggaran 2007-2013 demikian juga untuk perpustakaan digital juga sudah dikembangkan.

Ditambahkan, dukungan Gubernur terhadap perpustakaan di Jawa Barat juga sangat baik, terbukti dengan terwujudnya pembangunan Perpustakaan bertaraf Internasional, pengadaan buku secara bertahap dan pembangunan Perpustakaan digital serta pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, PKK dan Perpustakaan Keliling. (Spy)

## Komisi X Secepatnya Panggil Mendikbud

Amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 mengundang kecaman dan kekecewaan sejumlah anggota Komisi X DPR. Karena itu Komisi X DPR secepatnya akan memanggil pihak yang paling bertanggungjawab yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh.

“Secepatnya Mendikbud akan kami panggil guna mendengar penjelasan secara kongkrit mengapa terjadi kelambatan distribusi soal ujian,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Bandung, Selasa (23/4).



Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto.



Di sela-sela acara peninjauan pelaksanaan Ujian di SMP Negeri 10 Kota Bandung, Jawa Barat, Utut Adianto menegaskan, sedianya pemanggilan Mendikbud akan dilakukan pekan lalu, namun batal karena Komisi X mempertimbangkan serta menjaga suasana tenang dulu, mengingat saat itu masih berlangsung UN.

“Kasihannya anak sekolah akan terganggu konsentrasinya. Adanya penundaan UN saja, anak sudah sangat terganggu konsentrasinya, karena itu kami berusaha menyelamatkan peserta UN dengan segala cara, termasuk menunda pemanggilan Mendikbud,” jelasnya.

Ditegaskan Utut, Komisi X berkomitmen untuk menyelamatkan anak didik, sehingga temuan di lapangan terkait dengan karut marutnya UN 2013 akan dibahas bersama dengan Mendikbud sesegera mungkin. Saat ini, sambung politisi PDI Perjuangan ini, Komisi X DPR sedang mengumpulkan data-data hasil temuan di lapangan, sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

“Konsepnya seperti apa, apa UN masih tetap diteruskan atau tidak apa perlu dicarikan formula lain yang sifatnya memudahkan peserta anak didik, tapi tidak mengurangi kualitas pendidikan,” papar Utut.

Masih menurut Utut, Komisi X DPR masih akan terus mendengar dan mengumpulkan aspirasi sebanyak-banyaknya termasuk desakan dari publik agar Ujian Nasional dihapuskan.

Sementara anggota Komisi X DPR yang lain Popong Otje Djundjungan mengatakan, sistem Ujian Nasional sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaannya sangat jelek, sehingga evaluasi mutlak diperlukan. Kejadian seperti ini seumur-umur baru disaksikan di tahun 2013 ini, dan merupakan



Anggota Komisi X Popong Otje Djundjungan.

kejadian yang sangat konyol.

“Mestinya setiap ada even penting seperti UN, perlu ada evaluasi terlebih dahulu sebagai bahan koreksi sehingga pelaksanaannya kedepan harus lebih baik lagi jangan terjadi seperti sekarang ini,” tandas Popong.

Politisi senior Partai Golkar ini mengemukakan, sejujurnya ia kurang setuju dengan adanya Ujian Nasional. “Bagaimana karut marutnya ujian nasional ini dan di beberapa daerah ujian nasional seperti dipaksakan. Kejadian seperti ini kan tidak baik, kita akan minta Mendikbud menjelaskan kepada Dewan,” tambah Popong menegaskan. (Spy)

## Komisi X Kecewa Pelaksanaan UN di Sulsel

Komisi X DPR RI kecewa pada kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengemuka setelah Tim Kunker Komisi X berdialog dengan Pemprov serta Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/4)

UN yang masih penuh dengan perdebatan, memang masih dijadikan parameter kemajuan pendidikan di daerah-daerah dan bagaimana pem-

erataan pendidikan Indonesia. “Tapi dengan penyelenggaraan seperti ini kami, Komisi X kecewa dan prihatin. Mulai lembar jawab yang kualitasnya tidak baik, distribusi soal yang ambur-adul dan sebagainya. Karena itu Pak Menteri Pendidikan harus menjelaskan secara komprehensif,” ungkap Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri yang memimpin tim Kunker.

Kekecewaan ini beralasan, setelah menerima laporan bahwa di beberapa kabupaten di Sulsel terjadi keterlambatan distribusi soal, adanya soal yang tertukar dan membengkaknya biaya

pengiriman karena harus memakai helikopter.

“Ini yang harus ditelaah lagi apakah tetap menjadikan UN sebagai satu-satunya ukuran dengan pelaksanaan seperti ini. Soal yang cenderung bocor di beberapa daerah sehingga nantinya hasil ujian ini tidak mencerminkan kualitas sebenarnya dari peserta ujian,” jelas Syamsul.

Sebelumnya Komisi X telah mengadakan rapat dengan Kemendikbud, mengenai penyelenggaraan UN 2013 dan Menteri Dikbud menyatakan



lancar dan siap dalam penyelenggaraannya. Tetapi pada kenyataannya sekarang tidak demikian.

“Kami akan meminta bertemu dengan Menteri Dikbud, yaitu pada Jumat malam (26/4), walaupun ini dalam masa reses. Tapi karena ini sangat urgen, perlu mendapat perhatian dan direspon segera, kami harus mendapat penjelasan pemerintah kenapa ini terjadi dan bagaimana konsekuensi lebih lanjut,” kata Syamsul. (Ray), foto : ry/parle/hr.

Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri.



## DPR Yakin Semua Ormas Mendukung RUU Ormas



Suasana diskusi Forum Legislasi tentang RUU Ormas.

Wakil Ketua Pansus RUU Ormas, Deding Ishak meyakini sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Gereja Indonesia dan ormas yang lain mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas menjadi Undang-Undang (UU) dengan catatan adanya perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang dianggap mengkhawatirkan menghambat demokratisasi, HAM, dan kebebasan berkumpul.

“Khusus untuk Muhammadiyah yang

menolak RUU Ormas ini, keinginannya sudah kita penuhi terkait asas, sanksi, dan kriminalisasi terhadap kaum dermawan. Ketiga hal tersebut sudah kita perbaiki, lalu kenapa kok masih menolak?” tanya Deding Ishak pada acara diskusi Forum Legislasi tentang RUU Ormas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/4). Selain Deding Ishak, dalam diskusi itu hadir juga Ketua bidang hukum dan HAM PP Muhammadiyah Saiful Bahri, dan Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Budi Prase-

tyo.

Soal asal misalnya, lanjut Ishak, setiap ormas harus berasaskan yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Sanksi sudah diatur dengan jelas melalui proses pengadilan sampai ke Mahkamah Agung (MA). “Khusus untuk NU, Muhammadiyah, Taman Siswa dan yang lain-lain yang lahir sebelum merdeka dan justru berjasa terhadap bangsa dan negara ini, maka akan ditempatkan secara khusus sebagai ormas keagamaan dan sosial yang berjasa buat bangsa. Jadi, tak sama



dengan ormas yang tidak berperan dan berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa ini,” ujar politisi Golkar itu.

Sementara itu terkait kriminalisasi bagi dermawan yang sebelumnya dilarang menyebut ‘hamba Allah’, itu pun kata Deding Ishak sudah dibolehkan di mana sumbangan berupa dana, uang, barang dan sebagainya boleh menggunakan identitas sebagai ‘hamba Allah’. “Lalu kenapa masih juga menolak? Karena itu, Pansus masih terus bersedia berdialog dengan semua pihak, di mana tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, selama bisa dimusyawarahkan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Ditjen Kesbangpol Kemen-

terian Dalam Negeri Budi Prasetyo mengatakan tujuan RUU Ormas ini agar tak jadi benturan-benturan dalam kegiatannya, sehingga perlu diatur dasar hukumnya. RUU Ormas ini merupakan RUU paling lama, hampir dua tahun pembahasannya di DPR.

Apalagi sekarang ini sudah mencapai 65 ribu ormas yang berizin di Kemendagri dan RUU Ormas itu tidak tumpang-tindih dengan UU yang lain. “Intinya kita sepakat menjaga demokratisasi, tapi jangan sampai mengganggu ruang publik dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM PPM Muhammadiyah Saiful Bahri mendukung RUU Ormas, jika RUU itu disahkannya setelah pemilu 2014

mendatang. Alasannya, dia khawatir ada dana-dana ormas yang disalurkan justru untuk kepentingan politik 2014. “Kalau disahkan setelah pemilu tidak masalah,” tegasnya.

Saiful juga menolak jika UU Nomor 8/1985 tentang Ormas produk Orde Baru itu diterapkan sekarang ini, karena dipastikan represif. Dia menilai RUU Ormas itu tidak urgen sekarang ini, dan cukup menggunakan UUD 1945 pasal 28 (ayat a sampai i).

“Soal Ormas itu sudah diatur jelas dalam pasal 28 ayat A sampai I. Karena itu kalau RUU Ormas itu disahkan sekarang, kami akan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya. (nt), foto : eka hindra/parle/hr.

## Ketua DPR Lantik Anggota DPR PAW



Ketua DPR Marzuki Alie melantik anggota DPR PAW Ebrown Lubuk.

Ketua DPR Marzuki Alie memimpin pengucapan sumpah jabatan anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Golongan Karya di Operation Room, Gedung Nusantara, Jumat (19/4).

Anggota PAW yang diambil sumpah jabatannya yaitu Ebrown Lubuk menggantikan Ahmed Zeki Iskandar Zulkarnain (Fraksi Partai Golongan Karya). Ahmed berasal dari daerah pemilihan Banten III, sementara itu, Ebrown berlatar belakang pengacara.

Pelaksanaan sumpah jabatan berjalan dengan khidmat. Nampak sejumlah anggota DPR hadir, di antaranya Ibnu Munzir (Fraksi PG) dan Ichsan Soelistio (Fraksi PDIP).

Ebrown dilantik setelah keluarnya Keputusan Presiden No. 47 Tahun 2013 tertanggal 18 April 2013. Sebelumnya, Ahmed Zaki menjadi anggota Komisi I. Karena ia terpilih menjadi bupati Tangerang, posisinya di DPR digantikan oleh Ebrown. (sf), foto : eka hindra/parle/hr.

## Masyarakat Miskin Akan Dapat Berkah RUU P3

Komisi IV DPR akan berusaha keras agar Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) bisa diselesaikan pada masa persidangan IV tahun 2012-2013 yang akan dibuka 13 Mei 2013. RUU ini merupakan produk reformasi yang memberikan ruang kepada rakyat dengan berbagai

fasilitas program dan kemudahan untuk rakyat, khususnya petani.

“Saya yakin betul kalau RUU P3 bila diselesaikan, maka bukan saja petani yang diuntungkan tetapi masyarakat secara luas, masyarakat miskin akan mendapatkan berkah dari UU ini,” tan-

das Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Menurut Herman, dalam RUU ini ada dua ruh penting, pertama adalah jaminan terhadap gagal panen. Resiko usaha di bidang-bidang lain seperti *manufactur*-rata-rata sudah diasuran-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

sikan korporat masing-masing. Resiko usaha yang terjadi sudah mendapatkan asuransi secara proporsional dan profesional karena masuk kategori *pruden* (aman).

Namun lanjutnya, usaha petani sangat kultural semua dilakukan dengan apa adanya (konvensional), tradisional, tidak pernah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang sifatnya intelektual, konseptual.

Jaminan Perlindungan terhadap gagal panen bukan semata-mata pemerintah memfasilitasi dan membuka akses kepada asuransi. Lebih dari itu, pemerintah akan memberikan premi asuransi disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Asuransi ini termasuk meng-cover perubahan iklim sehingga ketika kemudian terjadi gagal panen risikonya akan ditanggung asuransi. Sedangkan

resiko lain seperti kerusakan atau dibakar akan diatur melalui peraturan menteri.

Politisi Partai Demokrat ini menyatakan yakin, ini sebuah cara untuk memotivasi petani sehingga lebih mempunyai keinginan usaha dan upaya lebih baik. Bahkan dengan adanya jaminan gagal panen ini petani yang tadinya enggan menggarap tanah yang berisiko, seperti kemarau atau gangguan hama, mereka akan *all out*, membuka lahan baru.

Hal kedua terkait dengan pembentukan unit khusus di bank-bank pemerintah. Dalam salah satu pasal di UU ini mewajibkan pembentukan unit khusus yang menangani bidang pertanian. Unit khusus ini adalah lembaga yang dibentuk di dalam bank-bank pemerintah atau unit atau bidang tertentu yang akan memberikan kemudahan, penyederhanaan aturan dan penyaluran program.

Pembentukan unit khusus inilah yang kemudian akan mendorong upaya-upaya memobilisasi petani supaya memanfaatkan program-program pemerintah yang memang selama ini sudah berjalan. Program itu diantaranya kredit ketahanan pangan dan energi, Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bahkan peraturan Bank Indonesia nomor 45 sudah mengalokasikan 5 sampai 20 persen dari masing-masing bank umum yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah termasuk di

dalamnya pertanian.

“Bahkan, kami sudah membuka ruang kalau ada bank swasta yang berniat membuka unit khusus sejenis yang memang itu dikeluarkan pemerintah. Dengan unit khusus itu pemerintah akan memfasilitasi penyaluran terhadap program skim pembiayaan yang dibiayai APBN,” ujar Herman.

Untuk para petani yang memiliki lahan sempit, UU mengatur pemerintah wajib menyediakan 2 hektar, dan masyarakat diberi hak kelola, misalkan 25 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun, supaya lahan negara ini tidak beralih fungsi. Hal ini didasarkan kepada kedaulatan dan kemandirian pangan, sesuai UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dengan harapan masyarakat bisa mempertahankan lahan pertaniannya.

Menurut Herman, RUU ini tinggal ketok palu saja. “Kita sudah menyelesaikan 2 pasal krusial, asuransi petani dan pembiayaan untuk petani. Di masa sidang berikutnya, hanya merapikan di tim kecil, merumuskan melalui tim perumus, dan mensinkronkan melalui tim sinkronisasi. Setelah itu akan masuk ke dalam rapat panja, lalu rapat Komisi dengan Kementerian Pertanian dan institusi terkait. Kita ambil keputusan tingkat I dan kemudian didorong di paripurna terdekat untuk diambil keputusan tingkat II,” demikian Herman Khaeron. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR Dukung Universitas Singaperbangsa Jadi Universitas Negeri

Wakil Ketua Komisi X Utut Adiانتو menyatakan dukungan sepenuhnya pada permintaan Pengurus Yayasan Universitas Singaperbangsa, Karawang yang saat ini masih menjadi universitas swasta agar menjadi universitas negeri. Demikian dikatakan Utut ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X ke Provinsi Jawa Barat, Senin (22/4).

“Keinginan pengurus Universitas Singaperbangsa Karawang menjadi



Wakil Ketua Komisi X Utut Adiانتو.

Universitas Negeri, ini adalah merupakan hal yang sangat baik, maka Komisi X DPR pasti dalam posisi mendukung, dan ini harus segera disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Utut usai melakukan pertemuan dengan jajaran Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Menurut Utut, persyaratan terpenting yang harus dipenuhi untuk menjadi universitas negeri adalah soal keabsahan kepemilikan tanah. Termasuk



adanya gedung, dosen, serta program studi, kualifikasi yang jelas dan sarana prasarana lainnya. Ia memperkirakan setidaknya membutuhkan waktu hingga 1 tahun bahkan lebih untuk meloloskan pengajuan itu.

“Pengajuan Universitas Singaperbangsa dari Swasta menjadi Universi-

tas Negeri itu perlu proses yang cukup panjang dan tidak semudah apa yang diharapkan, karena semua persyaratan-persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu,” kata Utut.

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan, seberapa perlu Universitas Swasta menjadi Universitas Negeri, se-

bab di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat lebih menonjol perguruan tinggi swasta dibanding negeri. Apalagi untuk untuk menjadikan Universitas Swasta ke Universitas Negeri tidak mudah dan harus melalui proses yang cukup panjang. (spy).

## Kesetjenan DPR Gelar FGD tentang SPIP



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti didampingi Deputy Administrasi Slamet Sutarsono dan Pejabat BPK Sihar Panjaitan.

Kesekretariat Jenderal (Kesetjenan) DPR RI, Selasa (23/4) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk pejabat Eselon I, II, III, IV di lingkungan DPR RI dengan menengahkan tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini menurut Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti sangat penting karena berkaitan dengan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP dimana PP ini mewajibkan seluruh institusi pemerintah untuk mengendalikan seluruh kegiatannya.

Ditambahkan Win, sebenarnya PP ini dikeluarkan sejak lama, yaitu tahun 2008, namun saat itu PP tidak mengatur secara tegas *frame work* penerapannya. Dengan begitu selama ini Kesetjenan DPR RI lebih memfokuskan pada reformasi birokrasi yang ada aturannya jelas, baik tentang pelaksa-

naannya, SK Menteri dan segalanya.

“SPIP merupakan proses yang integral pada seluruh bisnis proses yang kita lakukan bersama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada monev (monitoring dan evaluasi). Jadi tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi tercapainya organisasi kita dalam konteks menyelenggarakan pemerintahan negara,” jelas Win.

Dengan demikian, SPIP ini merupakan penajaman, membantu, dan memudahkan Kesetjenan DPR RI dalam melakukan delapan area perubahan, yang seiring dengan waktu perubahan dari sebelumnya 3 perubahan, 5 perubahan dan sekarang 8 perubahan. “Jadi semua yang dilakukan dalam SPIP

ini merupakan bagian dari tahapan birokrasi reformasi,” ungkap dia.

Mengingat pentingnya SPIP ini, maka Setjen DPR RI telah membuat Peraturan No. 6 tahun 2012 tentang pelaksanaan SPIP di Lingkungan Setjen DPR RI. Hal ini menurut Win sebagai Panduan untuk implementasi SPIP di Kesetjenan DPR RI.

“Agar SPIP ini bisa berjalan dengan baik perlu komitmen kita semua karena sekali lagi sebaik-baiknya sistem kalau kita tidak serius melaksanakannya tidak akan ada artinya semua,” ungkap Win seraya berharap agar status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan hasil pemeriksaan sementara (Hapsem) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kembali diraih Kesetjenan DPR RI. (Ayu) foto:wahyu/parle

# DPR Siap Kunjungi Belarusia



Ketua DPR Marzuki Alie menerima Duta Besar Belarusia untuk Indonesia.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan kesiapan Parlemen Indonesia mengunjungi Belarusia dalam rangka menjalin hubungan bilateral kedua negara. Direncanakan delegasi Parlemen Indonesia akan bertolak ke Belarusia pada 3 Mei esok.

Demikian disampaikan Marzuki ketika menerima Duta Besar Belarusia untuk Indonesia HE. MR. Vladimir Lopato – Zagorsky di Gedung Nusantara III, Senin (22/4).

“Kunjungan Dubes Belarusia untuk Indonesia ini untuk memfinalkan agenda undangan Ketua Parlemen Rusia untuk Ketua DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 3–6 besok. Termasuk untuk memastikan agenda acara yang akan dilaksanakan di Belarusia,” jelas Marzuki.

Marzuki menambahkan, agenda di Belarusia diantaranya penandatanganan kerjasama antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Belarusia yang sudah disiapkan dan ratifikasi atas perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati. Termasuk agenda pembicaraan-pembicaraan dengan Perdana Menteri, Presiden, dan juga Parlemen Belarusia dalam rangka peningkatan hubungan antar kedua negara.

Politisi Demokrat ini menilai hubungan Indonesia dengan Belarusia pada posisi yang sangat baik. Ia pun berharap, dengan adanya kunjungan Parlemen Indonesia ke Belarusia dapat berjalan sesuai rencana dan mempererat hubungan kedua negara. (sf) Foto:wahyu/parle

## DPR Diminta Pertegas Kewenangan Provinsi Atas Pertambangan

Komisi VII DPR RI dan Pemerintah Pusat diminta untuk mempertegas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) dalam penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan meninjau kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola saat menerima Tim Kunjungan Kerja Komisi VII dan Mitra Kerja Komisi VII yang dipimpin Ketua Komisi Sutan Bhatogana di Kota Palu, Sulawesi Tengah,

beberapa hari lalu.

“Kewenangan pemerintah provinsi dalam menertibkan IUP sangat lemah karena dalam undang-undang tidak diatur secara tegas pemberian sanksi kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang keliru menerbitkan IUP,” kata Longki.

Menurut Longki, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan untuk menertibkan pertambangan. Namun, kata Longki, presiden lupa akan isi undang-undang





Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana menerima cinderamata dari Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

minerba, bahwa kewenangan pemberian IUP ada di Kabupaten. “Masa iya saya yang harus menertibkan IUP yang keliru itu,” katanya.

“Di Sulawesi Tengah masih terda-

pat IUP yang tumpang tindih terutama di Kabupaten Morowali. Kasus tersebut hingga kini belum seluruhnya ditertibkan,” paparnya.

Kewenangan yang diberikan pemerintah provinsi, ujar Longki, hanya sebatas pengawasan dan memberikan teguran kepada Bupati/Walikota yang bermasalah dalam penertiban IUP.

“Kewenangan tersebut sudah dijalankan bahkan sudah beberapa kali menyurat ke daerah yang sudah menerbitkan IUP yang bermasalah, tetapi karena tidak ada sanksi sehingga surat itu tidak memiliki kekuatan,” tandasnya.

“Semestinya sebelum pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan IUP paling tidak harus mendapat pertimbangan teknis dari gubernur, atau sebaliknya pemerintah provinsi yang menerbitkan IUP melalui rekomendasi kabupaten,” tambahnya.

Ia menyatakan, bahwa Undang-undang Pertambangan sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur masalah ini. Sebelum kawasan pertambangan diterbitkan, terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari gubernur.

Regulasi itu memberikan kewenangan keterlibatan pemerintah provinsi atas penerbitan ijin pertambangan. Sementara kondisi saat ini, pemerintah provinsi baru dilibatkan dalam penertiban jika ada masalah yang terjadi. (sc) foto:sc/parle

## Komisi VIII Terima Keluhan Kuota Haji Tak Proporsional

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Barat (Kalbar) mempertanyakan kuota haji yang tidak proporsional kepada Tim Komisi VIII DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pontianak, Kalbar. Saat ini Kalbar mendapat kuota 2.339 jamaah. Dengan rumusan 1:1000 penduduk muslim di suatu provinsi, mestinya Kalbar mendapat kuota 2.800 jamaah, karena penduduk muslimnya 2,8 juta jiwa.

Anggota Tim Komisi VIII DPR RI Abdul Aziz Suseno (F-PKS) yang ditemui Parleментарia, Kamis (18/4) di Pontianak menyatakan, akan segera membicarakannya dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) pada kesempatan rapat mendatang di Komisi VIII. Ini merupakan temuan penting yang harus dibicarakan, mengingat desakan peningkatan kuota haji yang adil di Kalbar terus disuarakan.

“Nanti akan dibicarakan dengan Pak Dirjen PHU. Mengapa sampai seperti ini. Data ini dari mana rumusannya,”



Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Aziz Suseno.

tandas Aziz. Namun, ditambahkan Aziz, secara nasional kuota haji kita belum meningkat karena Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga belum menambah kuota haji sesuai permintaan pemerintah Indonesia. Kuota nasional ini kemudian dibagi-bagi ke setiap provinsi dengan rumusan 1:1000 sesuai jumlah penduduk muslimnya.

Media-media setempat di Kalbar, seperti Tribune Pontianak pada Rabu (17/4) memberitakan bahwa Kanwil Kemenag Kalbar tidak adil dalam menetapkan kuota haji sesuai rumusan 1:1000 penduduk muslim. Karena kuota provinsinya tak sesuai rumusan, maka berdampak pada kuota setiap kabupaten/kota di Kalbar. Seperti diketahui di Kalbar ada 12 kabupaten dan 2 kota.

Di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, misalnya, media setempat memberitakan bahwa Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya memprotes keras kebijakan Kanwil Kemenag Kalbar yang tak adil dalam menetapkan kuota haji. Seperti diketahui Kabupaten Kubu Raya mendapat jatah kuota hanya 179 jamaah dari yang seharusnya 305 jamaah. Gubernur Kalbar Cornelis sempat merespon dengan mengeluarkan Surat Gubernur No.456/1152/kessos-B yang ditujukan kepada Kanwil Kemenag Kalbar. Namun, Kakanwil setempat malah menganulir surat gubernur tersebut. (mh)

# DPR Harap Donggi Senoro LNG Berdampak Positif Bagi Masyarakat



Tim Kunker Komisi VII gelar pertemuan dengan Direksi PT. Donggi Senoro dan instansi terkait.

Reses Masa Persidangan ini, Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup mengunjungi proyek Gas Alam Cair, PT. Donggi Senoro LNG di Banggai, Sulawesi Tengah.

“Tujuan kami berkunjung kesini, untuk mengetahui progres proyek Donggi Senoro. Saya percaya kontraktor yang mengerjakan ini sangat profesional dan berkualitas,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke PT Donggi Senoro LNG, Sutan Bhatoegana di sela-sela pertemuan dengan PT. Pertamina EP Matindok, JOB Pertamina Medco Tomori, PT Donggi Senoro dan SKK Migas, di PT Donggi Senoro, Desa Uso, Banggai, beberapa hari lalu.

Selain itu, Tim Komisi VII juga ingin mengetahui realisasi pengembangan gas Matindok, pengembangan blok minyak Tomori dan kontribusinya terhadap *lifthing* minyak dan gas nasional, dan pencapaian target pembangunan kilang Donggi Senoro dan dampaknya kepada masyarakat

setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Sutan memberikan apresiasi kepada investor Jepang yang telah berinvestasi di Donggi Senoro.

Namun Sutan mengharapkan, proyek Donggi Senoro LNG membawa keuntungan bagi lingkungan dan masyarakat Donggi Senoro.

“Selain berdampak positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar Luwuk sendiri, kita harapkan juga ada transfer teknologi yang diberikan kepada Indonesia. Jadi harus ada *multi player* efeknya kepada kita,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Sutan juga mempertanyakan masalah pembebasan tanah di Donggi Senoro, pasalnya Komisi VII banyak menerima surat pengaduan terutama mengenai masalah tanah di sekitar proyek Donggi Senoro.

“Jangan sampai rakyat di sekitar menderita akibat adanya proyek ini,

akibat segelintir orang atau oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri,” tegasnya.

Walaupun demikian, ia menyatakan, Komisi VII DPR RI memberikan dukungan kepada proyek Donggi Senoro.

“Mudah-mudahan proyek ini dapat berjalan sesuai waktunya, dan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada,” tambahnya.

Dijelaskan Sutan, bahwa kedatangan Komisi VII ini untuk yang kedua kalinya. “Mungkin apa yang kami dapat sekarang ini mengenai Donggi Senoro LNG sudah lebih baik dari Tim Komisi VII yang datang tahun lalu.

Hasil pertemuan di sini akan kami laporkan pada Pleno Komisi VII,” terangnya.

Proyek Donggi Senoro LNG merupakan proyek LNG pertama di Indonesia yang dikembangkan dengan memisahkan kegiatan usaha hulu (penyediaan bahan baku gas) dan kegiatan usaha hilir (pabrik LNG), sehingga memberikan keuntungan karena ada pengalihan investasi dan resiko yang terkait dengan pembangunan pabrik LNG kepada perusahaan hilir.

Pabrik LNG Donggi Senoro berkapasitas produksi sebesar 2 juta ton per tahun, menggunakan teknologi *liquifijasi* APCI (*Air Products and Chemicals Incorporation*) yang telah teruji, yang saat ini di gunakan oleh 86% dari seluruh proyek LNG di dunia.

Kilang LNG Donggi Senoro akan mengolah gas yang dipasok dari Blok Senoro yang dikelola oleh JOB Pertamina Medo Tomori Sulawesi dan Blok Matindok yang dikelola oleh Pertamina Pengembangan Gas Matindok. (sc)



# UN Tahun 2013 Seperti Lebaran, Tidak Serentak

Pertemuan antara Tim Komisi X DPR dengan Walikota Balikpapan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di ruang rapat kantor Walikota Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (17/4) malam membahas keterlambatan Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA.

Menghadapi kondisi ini Ketua Tim Komisi X DPR Syamsul Bachri mengatakan bahwa dirinya telah menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh, bahwa di Balikpapan Kalimantan Timur belum semua daerah menerima soal UN, karena itu disarankan agar ditunda sampai soal-soal UN betul-betul lengkap.

Namun menurut Syamsul, Mendikbud Moh. Nuh tetap pada pendiriannya agar soal UN yang ada difotocopi saja dan diserahkan kepada Universitas Mulawarman sebagai pihak yang bertanggungjawab soal UN tersebut. Syamsul Bachri mengatakan di Balikpapan Kalimantan Timur masih kurang 155 amplop soal, dan 9 amplop soal di Kaltim. "Patut disayangkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh Nuh tetap saja ngotot memaksakan agar tetap dilaksanakan UN dengan cara

fotocopi," tukasnya.

Pada saat rapat sedang berlangsung wakil orang tua murid Subiyanto menyela dengan mengatakan UN sekarang modelnya seperti lebaran yang tidak serentak. Ada model lebaran ala NU dan ala Muhammadiyah. Begitu pula UN di Indonesia, ada UN bagian barat dan UN bagian timur. Di Indonesia Bagian Barat dilaksanakan lebih dulu di Indonesia Timur dilaksanakan belakangan.

Pelaksanaan UN yang tidak serentak ini mengundang komentar yang bernada miring kepada Mendikbud. "Jika Menteri tetap memaksakan kehendaknya, berarti Menteri tidak belajar dari Pegadaian, yang memiliki moto "Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah". Tetapi sebaliknya, Mendikbud justru memecahkan masalah dengan menambah masalah, "tandas Subiyanto lantang.

Komentar lain diutarakan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Heri M bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini seperti sedang menunggu istri yang sedang mel-



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri.

hirkan. Semuanya dibuat cemas dan perasaan yang tidak karuan, maka alangkah baiknya UN ditiadakan saja biar kita semuanya tenang tidak seperti resah dan gelisah,

Subiyanto menyarankan, agar UN untuk SMA di Kalimantan Timur sebaiknya tidak mengikuti instruksi Mendikbud, namun ditunda saja agar persiapan di daerah lebih mantap dan sempurna, (Spy). Foto: Wy/Parle.

## Hasil UN Pantas Dibatalkan

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar menilai karut marutnya pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA pada tahun ini membuat hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengusulkan sebuah konsensus nasional agar penilaian UN kali ini dibatalkan.

"Ini harus jadi konsensus nasional, dalam rapat kerja saya akan sampaikan rasanya pantas hasil UN ini dibatalkan seluruhnya, tidak adil ada yang dapat foto copy, ada yang menyusul, apalagi banyak laporan kebocoran. Jadi anak-anak dinilai sekolah saja," tegasnya dalam acara dialog radio Bersama Wakil Rakyat kerjasama Pemberitaan



Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar.

Setjen DPR dengan RRI Pro 3 Nasional

di Jakarta, Jumat (19/4/13).

Apalagi putusan pengadilan pada tahun 2007 jelas memutuskan agar UN tidak dilaksanakan sampai pemerintah dapat meningkatkan kualitas guru, pemenuhan sarana dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia. "Putusan ini dikukuhkan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pemerintah," lanjut anggota FPDIP yang akrab dipanggil Miing ini.

Ia mengingatkan amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memperkuat hal ini bahwa kelulusan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan yaitu guru

dan kepala sekolah. Baginya kasus semrawutnya pelaksanaan UN tahun ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melaksanakan amaran putusan MA dan kembali ke UU.

“Pemerintah tidak bisa sekedar minta maaf, Pak Nuh sebagai menteri memang harus bertanggung jawab tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, rasa malu, mundur adalah cara

yang paling baik,” demikian Miing. (iky)  
Foto: Wy/Parle.

## Komisi X Kecewa, Pelaksanaan UN Amburadul



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri.

kunjungan spesifik di SMA Negeri 1 Balikpapan, Kalimantan Timur untuk memantau pelaksanaan UN, Kamis (18/4).

“Pelaksanaan UN ini memang menjadikan rasa kekecewaan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena yang semula UN dilaksanakan serentak dengan jadwal yang sama, tetapi pada kenyataannya tidak berbarengan dan amburadul,” sesal Syamsul.

Terkait dengan UN yang amburadul ini, Komisi X secepatnya akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh untuk dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan UN ini. Selain itu, Komisi yang membidangi pendidikan dan pariwisata ini juga akan meminta M. Nuh untuk men-

pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini dianggap tragedi. Komisi X menilai pelaksanaan UN amburadul. Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menyatakan Komisi X betul-betul merasa kecewa dan hal seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Demikian dikatakan Syamsul selaku Ketua Tim

jelaskan secara komprehensif apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan pelaksanaan UN tahun ini.

“Jika pada tahun depan akan diadakan UN, kami meminta dalam pelaksanaan penyelenggaraannya harus lebih baik, atau malahan ditiadakan. Sebetulnya UN itu kan masih pro dan kontra, sebagian orang minta UN ditiadakan tapi sebagian masih ingin mempertahankan. Namun, karena Mendikbud mengatakan bahwa UN ini dimaksudkan untuk menjadi barometer kualitas pendidikan kita dan pemerataan pendidikan secara nasional, maka UN masih diadakan,” ujar Syamsul.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah memang ingin mengukur seberapa jauh eksploritas pendidikan nasional dapat diketahui secara maksimal, sehingga yang ada bisa dipacu dan yang sudah maju dapat dipertahankan. Oleh karena itu, Komisi X DPR memberi dukungan pada penyelenggaraan UN ini, dengan catatan UN dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Komisi X memberikan anggaran untuk pelaksanaan UN yang cukup besar, dengan harapan agar UN dapat berjalan dengan baik. Namun fakta dilapangan, pelaksanaannya amburadul.

Dalam kunjungan spesifik ke Kaltim ini, Tim Komisi X menemukan belum adanya kesiapan pelaksanaan UN. Bahkan dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim menyatakan bahwa masih ada 155 sekolah di Kaltim yang belum menerima soal, sehingga akan dilaksanakan pada Senin (22/4) pekan depan. (SPY)

## Komisi VII Janji Cari Solusi IUP Tumpang-Tindih di Morowali

Terkait adanya tumpang-tindih Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Komisi VII DPR RI berjanji akan mencari solusi terbaik, agar tidak menimbulkan sengketa berkelanjutan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke

Provinsi Sulawesi Tengah, Sutan Bhatogana dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Morowali yang diwakili Sekretaris Daerah, Syahrir Ishak dan Presiden Direktur PT.Vale Indonesia, Nico Kanter di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (17/4)

“Pertemuan ini tidak mencari pihak yang salah atau benar, tetapi mencari solusi untuk kepentingan negara dan

kesejahteraan masyarakat,” kata Sutan.

Ia menyatakan, hasil pertemuan tersebut akan dibahas lebih lanjut di Komisi VII, kemudian Komisi VII akan memanggil kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Morowali dan PT. Vale Indonesia.

Menurut Sutan, saat ini di Kabu-





Tim Kunjungan Kerja Komisi VII berdialog dengan Pemkab Morowali.

paten Morowali terdapat 43 IUP tumpang tindih yang berada di lahan konsesi milik PT. Vale Indonesia. Hal tersebut terjadi, karena lahan konsesi milik PT. Vale Indonesia yang luasnya mencapai 36 ribu hektar tak kunjung dimanfaatkan.

“Kepala daerah memberikan ijin

kepada pihak lain untuk mengolahnya agar dapat pemasukan,” terang Sutanto.

Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Syahril Ishak dalam pertemuan yang dimediasi Komisi VII tersebut, meminta PT. Vale Indonesia untuk tegas menyikapi kondisi itu dengan

menyepakati kontrak karya yang sebelumnya telah disepakati.

“Kalau mau dimanfaatkan, silahkan. Jangan ditunda-tunda. Kami memberikan ijin ke perusahaan lain karena lahan tersebut nganggur,” katanya.

Sementara, Presiden Direktur PT. Vale Indonesia, Nico Kanter mengatakan perusahaan tambang yang beroperasi dengan menggunakan IUP tumpang-tindih tersebut pada umumnya tidak memperdulikan kelestarian lingkungan.

“Banyak lingkungan hancur, perusahaan tidak membuat pelabuhan untuk mengangkut tanah mengandung nikel,” katanya.

Perusahaan yang sebelumnya bernama PT. INCO ini juga berencana melepas sejumlah lahan konsesinya karena dinilai terlalu luas.

Saat ini perusahaan tambang nikel terbesar kedua di dunia ini memiliki lahan efektif seluas 190 ribu hektar yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. (sc) foto:sc

## Marzuki: UN Tahun ini, Terburuk



Ketua DPR Marzuki Alie.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013 ini adalah yang paling buruk selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia meminta agar persoalan ini segera dicari penyebabnya.

“UN tahun ini adalah penyelenggaraan terburuk sepanjang pemerintahan SBY, harus diinvestigasi,” ujar Marzuki di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan,

Jakarta, Jumat (19/4).

Ia menyebut salah satu sumber masalah adalah perusahaan percetakan naskah ujian berada di satu wilayah. Sementara, penyelenggaraan ujian mencakup seluruh wilayah Indonesia. Politisi Partai Demokrat ini mengusulkan pencetakan soal ujian disebar ke beberapa wilayah sehingga distribusi soal ujian dapat dilaksanakan lebih mudah.

“Tidak boleh penyelenggaraan hanya di monopoli oleh satu perusahaan. Selain itu, perusahaan percetakan dibagi ke beberapa wilayah. Di bagi tiga rayon, empat rayon, Jakarta di mana, Sumatera di mana,” saran Marzuki.

Terkait dengan soal ujian yang di-fotocopy, Marzuki tidak menampik akan terjadi kebocoran soal ujian. Apalagi, ujian dilakukan tidak serentak.

Dia menghimbau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengevaluasi kinerja Kementeriannya. Menurutnya masalah ini bukan hanya akibat kesalahan menteri, perlu diperiksa pejabat di tingkat direktorat maupun pelaksana lainnya. (sf)foto:eka hindra/parle.

# Dharma Wanita Setjen DPR Gelar Donor Darah

Hari itu, ruang lobi gedung Nusantara penuh dengan para pendonor darah. Antusiasme para pendonor begitu tinggi. Tidak hanya pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, para tamu, dan masyarakat umum yang kebetulan berada di gedung DPR RI, ikut mendaftar menjadi pendonor. Aksi sosial ini telah menyedot perhatian masyarakat.



Ketua Dharma Wanita Setjen DPR Titi Djuned didampingi Tanti Setyanta.

Pelaksanaan donor darah ini dimotori Dharma Wanita Setjen DPR RI, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Aksi sosial ini juga bekerja sama dengan Korpri dan Koperasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ada live musik dan bazaar yang sekaligus memeriahkan suasana di gedung DPR RI. "Ini pelaksanaan donor darah yang ketiga dari Dharma Wanita," jelas Titi Djuned, Ketua Dharma Wanita yang ditemui Selasa (23/4).

Tanti Setyanta Ketua Bidang Sosial Dharma Wanita yang mendampingi Titi Djuned juga menambahkan, donor darah bisa dilakukan siapa saja. Karena antusiasme masyarakat begitu banyak, PMI sampai menyediakan 250 sampai dengan 300 kantong darah dalam even kali ini. Dan bila evennya dilaksanakan tepat di Hari Kartini, itu kebetulan saja. Biasanya even sosial seperti ini tidak harus pada perayaan hari-hari nasional.

Dijelaskan Titi Djuned, Dharma Wanita selalu menggelar kepedulian sosial, tidak saja lewat pelaksanaan donor darah, tapi juga khitanan massal, berkunjung ke panti-panti asuhan, hingga menolong korban banjir. Yang menarik, Dharma Wanita DPR RI juga kerap berkunjung ke pabrik-pabrik pengolah makanan untuk mengetahui proses produksi dan menambah pengetahuan seputar makanan yang biasa kita konsumsi.

"Kami pernah berkunjung ke pabrik pembuatan nugget di Balaraja, Tangerang. Ini agar ibu-ibu dapat pengetahuan bagaimana produksi nugget dan menumbuhkan keyakinan bahwa selama ini kita konsumsi ternyata sehat. Terus yang akan datang masih ada lagi. Kemungkinan berkunjung ke pabrik keju di Sukabumi, Jawa Barat. waktunya masih kita atur," ungkap Tanti Setyanta. (mh) Foto: Odjie/Parle.

## Meski Reses, Ketua DPR Lantik Anggota DPR

Ketua DPR Marzuki Alie memimpin pengucapan sumpah jabatan oleh tiga orang anggota DPR pergantian antar-waktu (PAW) dari Fraksi Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai PDI Perjuangan di Gedung Nusantara, Jumat (19/4).

Ketiga anggota PAW yang diambil sumpah jabatannya masing-masing yaitu Rahman Halid menggantikan Akbar Faisal (Fraksi Hanura) sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II. Kemudian Zulfikar dari dapil Sumatera Utara III menggantikan Maiyasyak Johan (FPP) serta Abidin Fikri menggantikan Theodorus Jakob Koekritis (FPDI Perjuangan) dari dapil Jawa Timur VI.

Pengangkatan Rahman dan Zulfikar sebagai anggota PAW DPR berdasarkan Keputusan Presiden RI masing-masing Nomor 38 dan 39 Tahun 2013 yang disahkan apada 9 April 2013. Sedangkan Abidin diangkat menjadi anggota PAW

DPR berdasarkan Keppres No. 43 Tahun 2013 yang ditandatangani pada 16 April 2013. Prosesi pengambilan sumpah dan jabatan terhadap tiga orang anggota PAW berlangsung khidmat dan tertib.

Dalam acara itu, hadir pula sejumlah petinggi fraksi maupun partai, diantaranya adalah Ketua Umum Hanura Wiranto, Sekjen PPP Romahurmuzyi, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, Sekjen PDIP Ahmad Basarah, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi.

Dalam sambutannya, Marzuki meminta maaf karena keterlambatan dalam pelantikan. Menurutnya, seharusnya pelantikan dilaksanakan 1 hari setelah Keppres turun, namun karena ada undangan Presiden Azerbaijan, sehingga baru hari ini dilantik. Ia berharap, dengan hadirnya anggota PAW ini dapat menunjang kinerja DPR.





Ketua DPR Marzuki Alie melantik tiga anggota DPR PAW.

“Sebagai anggota yang baru, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan kode etik anggota DPR, anggota baru dapat mempelajarinya dengan baik karena kode etik merupakan koridor untuk melaksanakan fungsi sebagai anggota DPR. Yang berikutnya terkait dengan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, diharapkan anggota yang baru juga mempelajari UU No. 27 Tahun 2009, dan tata tertib DPR No. 1 Tahun 2009,” pesan Marzuki.

Marzuki yakin, apabila anggota PAW ini memahami ketiga hal tersebut, dapat melaksanakan tugas dengan baik ketika ditempatkan di alat kelengkapan dewan. Selain itu, ia berharap ketiga anggota PAW dapat mewakili wakil masing-masing untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan nantinya dapat mengakhiri masa jabatannya dengan khushul khotimah (akhir yang baik). (sf) foto:wahyu/parle

## Koperasi Setjen DPR Laksanakan RAT ke XXVII

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengapresiasi kinerja Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Berkat kerja keras pengurus, Koperasi Pegawai Setjen Pegawai DPR mendapatkan beberapa prestasi.

“Saya ucapkan selamat kepada pengurus Koperasi atas terpilihnya juara dari 20 Koperasi Nasional untuk kategori Koperasi Pegawai. Tentunya ini harus dipertahankan, tidak mudah mempertahankan ini. Semoga ini menjadi motivasi dan dorongan bagi para pengurus untuk bekerja lebih baik lagi,” puji Winantuningtyastiti ketika memberi sambutan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Setjen DPR di Gedung Nusantara, Kamis (25/4).

Sekjen DPR yang akrab dipanggil dengan Win ini berpesan agar peran koperasi bukan hanya memberikan manfaat kepada diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia juga menyatakan agar pengurus mempertahankan prestasi, jangan sampai menemui hambatan, termasuk membenahi aspek-aspek yang masih kurang.

Ketua Koperasi Pegawai Setjen Rahmad Budiaji menyatakan pihaknya akan berusaha agar koperasi menjadi lebih baik lagi. Ia berjanji akan meningkatkan kinerja di seluruh unit usaha.



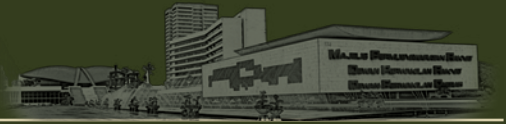
Suasana RAT XXVII Koperasi Setjen DPR.

“Dari tahun buku 2011 ke tahun buku 2012 kenaikannya cukup signifikan, salah satu indikatornya adalah catatan Sisa Hasil Usaha (SHU). Tentu ke depannya, sesuai harapan anggota dan arahan dari pembina, kita akan berusaha membuat lebih sehat, lebih baik dan lebih kuat lagi. Pengurus sudah melakukan identifikasi untuk hal-hal yang harus diperbaiki di tahun 2013,” jelas Aji.

Aji menyatakan ada detail-detail kinerja yang belum sesuai harapan, yaitu di unit kerja perdagangan kredit dan pengadaan barang dan jasa. Oleh

karena itu perbaikan kinerja akan disesuaikan dengan Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya di aspek pengorganisasian dan manajemen koperasi.

Terkait dengan kerjasama, Aji dan pengurus akan melakukan sinergi dengan mitra strategis, terutama perbankan, jasa asuransi dan kedinasan. Dalam rapat tahunan ini juga akan dibahas mengenai jaminan di masa pensiun anggota, yang tujuannya agar anggota koperasi mendapat jaminan di masa bekerja dan masa pensiun. (sf) foto:wahyu/parle



Ketua DPR Marzuki Alie melantik dan mengambil sumpah Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) tiga orang Anggota DPR RI, Rahman Halid (F-Hanura), Zulfikar (F-PP) serta Abidin Fikri (F-PDIP) di Operation Room Gedung Nusantara. Jumat (19/04), foto :wahyu/parle/hr.



Ketua DPR Marzuki Alie melantik dan mengambil sumpah Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI Ebrown Lubuk (F-PC) di Operation Room, Gedung Nusantara. Selasa (23/04), foto : eka hindra/parle/hr.



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti melantik dan mengambil sumpah 25 Orang Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI. Rabu (24/04), foto : hr,iw,wy dan od/parle/hr



Dharma Wanita Sub Unit Setjen DPR RI, KORPRI dan Koperasi Setjen DPR RI bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), menggelar aksi sosial Donor Darah dan Bazar di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selasa (23/04). Foto : iwan armanias, wahyu, odjie/parle/hr.

